

UPAYA WORLD VISION MELAKUKAN PELESTARIAN HUTAN MELALUI SEKOLAH HIJAU DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2014

Edwin Peter Mathews Pangaribuan¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, A.A. Ayu Intan Parameswari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: peterpangrib@gmail.com¹, rainypriadarsini@yahoo.com²,

ABSTRACT

Environmental issue such as deforestation is one of serious threats toward national development. Especially for Indonesia as developing country. Society does not have power to fight the palm oil exploitation in Sambas District, West Kalimantan. Awareness-Raising as empowerment so that people have power against deforestation issue in Sambas. Advocacy helps people to gain their rights back on environment-based education against deforestation through forest conservation learning at school. The effort is a political act to influence people and government. The efforts as a bottom-up approach through the green schools in Sambas. This research aims to describe the effort undertaken by World Vision as INGO helped forests conservation in Sambas, West Kalimantan.

Key words: World Vision, empowerment, Bottom-up Approach

PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia menjadi potensi besar sebagai paru-paru dunia, berdasarkan data *Food and Agriculture Organization* (2015) luas wilayah hutan tropis terbesar ketiga setelah Zaire dan Brazil. Namun dengan luas tersebut tidak diimbangi dengan usaha pelestariannya, sehingga sejak 2009-2013 Indonesia kehilangan wilayah hutan mencapai 1 juta Hektar (Listiya, T., 2015). Hilangnya luas wilayah hutan dikarenakan deforestasi (kerusakan hutan) sebagai konversi kawasan lahan produksi untuk kepentingan sektor non-kehutanan seperti perkebunan kelapa sawit (Hidayat, H., 2011: 88). Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia mengalami deforestasi yang mengkhawatirkan dikarenakan setiap tahunnya terjadi penyempitan wilayah tutupan hutan sekitar 427.000 Ha *Forest Watch Indonesia* (2014). Terdapat izin eksploitasi kelapa sawit dari negara yang

diberikan oleh pemerintah membuat semakin mendesak kebutuhan masyarakat terhadap lahan bertani dan pemanfaatan hasil hutan (Kompas, 2014).

Berdasarkan pemaparan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemsos RI) bahwa deforestasi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang semakin minim di Kabupaten Sambas (Huruswati, I., dkk, 2012). Masyarakat tidak memiliki daya dalam menghadapi kekuatan perkebunan kelapa sawit. Huruswati (2012) mengungkapkan hal tersebut disebabkan minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena pendidikan yang minim di Kabupaten Sambas, sehingga pekerjaan seperti buruh kelapa sawit menjadi mata pencaharian utama tanpa memikirkan dampak kedepan bagi masyarakat. Indonesia memiliki arah pembangunan dengan mencanangkan pendidikan lingkungan sebagai kebijakan nasional dan organisasi

non-pemerintah di Indonesia dapat berkontribusi mengembangkan pendidikan lingkungan hingga tingkat Kabupaten.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui upaya World Vision di Indonesia dalam pelestarian hutan di Kabupaten Sambas melalui sekolah hijau yang ditujukan pendidikan lingkungan bagi anak usia dini sebagai pemberdayaan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Politik Lingkungan

Paterson (2000, dalam Hidayat H, 2011: 8-9, 20) mengungkapkan politik lingkungan merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan permasalahan lingkungan dengan politik ekonomi. Paterson (dalam Haynes et.al., 2006) menjelaskan bahwa munculnya aktor-aktor baru di kancah internasional melalui hubungan masyarakat global seperti *Non-Governmental Organization* (NGO), berguna untuk memecahkan sifat eksklusif Negara. Isu lingkungan dapat masuk mempengaruhi kebijakan melalui gerakan kepedulian atau pelestarian terhadap lingkungan yang semakin rusak (*green politics*). *Green politic* memperhatikan isu ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menggagas pembangunan berkelanjutan yang bertujuan agar terdapat keseimbangan antara lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam menangani kemiskinan serta kelaparan (Steans & Pettiford, 2005: 382 dalam Ikbar, Y., 2014).

Willets (2011) mengungkapkan NGO mulai menyadari perlunya berkontribusi untuk merubah pemikiran bahwa pembangunan seharusnya memprioritas keterlibatan masyarakat sipil pada setiap perencanaan. Pemikiran tersebut terkait pemberdayaan (*empowerment*) memberikan posisi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan melalui inisiatif lokal dengan mencari fenomena permasalahan seperti kemiskinan (Sulistiyani A. T., 2007). NGO melihat akibat deforestasi membuat melemahnya kontribusi masyarakat lokal dalam sektor ekonomi dan

mengakibatkan menurunnya kesejahteraan (Hidayat H, 2011: 17).

Indonesia mencanangkan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata (sekolah hijau) dan NGO dapat menjadi mitra untuk implementasinya. Hal ini mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara khusus warga sekolah agar diupayakan pelestarian lingkungan hidup sehingga bermanfaat bagi kepentingan generasi sekarang maupun mendatang (Salim, E., 2005).

Non-Governmental Organization

Terdapat pendekatan untuk melihat arah hubungan NGO dengan aktor negara, seperti *Bottom-up* merupakan hubungan pengaruh NGO kepada negara dengan tujuan meningkatkan kehidupan manusia. NGO memiliki program yang dikerjakan bersama masyarakat untuk pengembangan kemampuan atau kapasitas mereka sebagai fokus dalam proses pendekatan *Bottom-up* (Ulleberg, 2009). Menurut Sutomo (1998), intervensi lebih difokuskan sebagai bagian *enabling process* atau upaya pengembangan kapasitas masyarakat. Menurut Sumodiningrat (2002) *Enabling process* merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun daya atau kemampuan melalui pengembangan potensi. Ife (1995) mengungkapkan bahwa pemberdayaan juga merupakan proses membantu masyarakat tertinggal dengan cara mendidik, menggunakan lobi, memakai media dan terlibat dalam aksi politik dan sebagainya. bahwa intervensi NGO dilakukan melalui pengembangan kapasitas masyarakat lokal dengan cara peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan merupakan proses pendekatan *Bottom-up*.

UNESCAP (2000) menjelaskan bahwa NGO memiliki fungsi penting untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui kesadaran terhadap isu lingkungan serta menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Berikut fungsi yang dijalankan dari NGO seperti *Awareness – Raising, Campaigning and Advocacy; Education, Training and Capacity Building; Government and NGO Partnership*.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dilakukan secara deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai upaya atau usaha yang dilakukan World Vision. Jenis data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan sumber adalah data tidak langsung yang dilakukan dengan studi dokumen. *Library Research* atau studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui data sekunder yakni dokumentasi resmi yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sambas sejak tahun 2010 memiliki kawasan hutan seluas 193.375 Ha, dan terus mengalami deforestasi akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit hingga 80.000 hektar pada Tahun 2014. Izin pengalihan lahan hutan membuat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap lahan bertani dan pemanfaatan hasil hutan. Pekerjaan yang hanya bertaraf petani kecil tradisional membuat semakin minimnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam mengelola dan melestarikan hutan (REDD, 2014). Hal tersebut dirasa karena masih terbatas atau minimnya kapasitas SDM karena rendah tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk berusia produktif.

Kecamatan Sajingan Besar sebagai contoh, mayoritas usia produktif penduduk merupakan tamatan Sekolah Dasar sehingga tidak mengherankan bila mata pencaharian penduduk hanya pekerjaan informal seperti buruh kelapa sawit. Hal ini berpengaruh pada ketidakmampuan pengelolaan sumber daya di lingkungan sekitar (Huruswati, I., dkk, 2012: 55-56). Pemerintah melalui tim evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial mengungkapkan bahwa hingga tahun 2012, masih belum mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan di daerah Sambas.

Freddy H. Tulung (2002, dalam Tuijl, P.V., dkk, 2005) mengungkapkan pemerintah melihat peranan NGO diperlukan guna mendorong inisiatif masyarakat yang independen untuk berpartisipasi aktif dalam

program-program pemerintah melalui peningkatan kapasitas masyarakat. World Vision sebagai NGO merupakan lembaga perwakilan di Indonesia karena memiliki badan hukum terpisah dan dewan nasional tersendiri (World Vision International, 2011). Peraturan di Indonesia tentang organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebelumnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nomor 365 sebagai yayasan. Walaupun peraturan yayasan diadopsi dari Kolonial Belanda namun telah diperkuat dari putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973 untuk menetapkan yayasan merupakan badan hukum.

Awareness-Raising, Campaigning and Advocacy

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi lingkungan merupakan usaha yang dilakukan NGO untuk berpartisipasi dan mendukung program pembangunan berkelanjutan. Sejak Tahun 2007, penelitian yang dilakukan perwakilan World Vision telah dilakukan pada tiga daerah tersebut berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas (Nadie, 2008). Beberapa anak-anak yang berhenti sekolah memiliki orang tua yang masih bisa menyekolahkan mereka, namun lebih memilih sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Hal ini diakibatkan oleh minimnya tenaga pengajar secara kualitas dan kuantitas hingga fasilitas belajar belum memadai (wahyuni, A., 2013).

Kementerian Sosial mengungkapkan bahwa tamatan SD merupakan tingkat pendidikan yang dominan di masyarakat Kecamatan Sajingan Besar. Berdasarkan data tamatan sekolah lanjut pertama maupun atas, sekitar 980-990 memperlihatkan lebih dari setengah jumlah yang bersekolah dasar (SD) tidak melanjutkan ketingkat pendidikan selanjutnya. Kementerian Sosial juga mengungkapkan bahwa dengan penduduk usia produktif yang didominasi masyarakat berpendidikan tamatan SD maka tidak mengejutkan mata pencaharian paling banyak menjadi buruh seperti di perkebunan kelapa sawit (Huruswati, I., dkk, 2012).

Pemerintahan Indonesia dalam hal ini pemerintah daerah yakni Bupati Sambas yang telah merekomendasikan World Vision untuk melakukan penelitian di tiga wilayah, mengakui kondisi dari dampak lingkungan dan minimnya kapabilitas tenaga pendidik. Hal ini juga disadari oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas bahwa masih minimnya kualitas maupun kuantitas tenaga pendidik (Wahyuni, 2013).

Indonesia ikut berpartisipasi untuk menerapkan *Education for Sustainable Development* (ESD) yang dicanangkan PBB sejak 2005-2014 di berbagai daerah. Namun, kondisi yang dialami oleh pemerintah adalah ESD belum terintegrasi dengan kondisi belajar-mengajar di sekolah-sekolah dikarenakan guru-guru tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengimplementasikannya (UNESCO, 2011). Pemberitaan media massa lokal tentang penelitian World Vision menemukan bahwa fokus permasalahan lingkungan berada pada kapasitas guru-guru di tiga lokasi. Hal ini selaras dengan kendala yang dialami oleh pemerintah Indonesia karena tenaga pendidik tidak memiliki keterampilan dan kemampuan dalam penerapan ESD.

Guna mencapai perencanaan pemerintah dalam pencapaian pendidikan pembangunan berkelanjutan maka World Vision melakukan pertemuan forum anak di desa-desa dan juga seminar di daerah Sambas untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi anak-anak mengenai kondisi lingkungan. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan guna mensosialisasikan pendekatan pendidikan lingkungan kepada anak-anak untuk terlibat melindungi lingkungan dari kerusakan hutan. Tahun 2010, World Vision juga mengirim sepuluh tenaga pendidik ke daerah Sanggau untuk memperkenalkan pendekatan PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Dinas pendidikan Sambas sebagai lembaga pemerintah menyampaikan bahwa metode PAKEM dapat diterapkan oleh World Vision membuat para pelajar untuk kembali semangat bersekolah.

Tiga sekolah yang dijadikan model sekolah hijau yakni SDN 07 Sasak, SDN 01 Aruk dan SDN 03 Sajingan Besar berada pada daerah yang sangat mengkhawatirkan

atau darurat karena berada di wilayah yang mengalami permasalahan hutan. Berdasarkan data dari RPJMD kabupaten Sambas, bahwa ketiga sekolah tersebut berada di kecamatan Sajingan Besar. Menurut Huruswati (2012) bersama tim peneliti program pembangunan kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengungkapkan bahwa masyarakat Kecamatan Sajingan didominasi oleh suku Dayak yang memanfaatkan hasil hutan. Mereka yang terbiasa dengan sistem pertanian lahan berpindah untuk memanfaatkan kawasan hutan tidak mampu lagi bercocok tanam tanaman produktif karena lahan semakin menyempit untuk perkebunan kelapa sawit. Bila hal ini tidak ditangani atau diminimalisir resikonya, maka masyarakat Sambas seperti di Sajingan Besar tidak mampu melindungi dan melestarikan kawasan hutan bagi anak cucu mereka.

Sekolah hijau merupakan bentuk pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar anak-anak tersebut sehingga mereka menjadi nyaman belajar. Berdasarkan manfaat taman jenis tanaman hutan di sekolah hijau dapat membuat masyarakat di Sambas sadar dalam melestarikan hutan. Selain itu juga memberi nilai ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan dari semakin minimnya pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Sambas karena banyak masyarakat yang bekerja menjadi buruh sawit. Pembuatan taman di sekolah hijau World Vision sebagai kegiatan metode pembelajaran PAKEM untuk menyadarkan siswa secara langsung dalam memahami dan menemukan cara mengatasi masalah hutan.

Program sekolah hijau adiwiyata diadopsi oleh World Vision dalam mengembangkan sekolah hijau di Sambas. Terdapat kebijakan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif serta pengelolaan sarana ramah lingkungan (*Canadian Coalition on Climate Change Development*, 2013). Pelaksanaan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) sebagai wujud kurikulum berbasis lingkungan merupakan implementasi ESD.

Hambatan yang dihadapi World Vision dalam memberikan kesadaran mengenai pendidikan lingkungan melalui sekolah hijau adalah minimnya kualitas guru berpendidikan S-1 keatas (RPJMD, 2011: 48-50). Oleh karena itu yang dilakukan World Vision dalam menghadapi kendala tersebut adalah membentuk tim sosialisasi program sekolah hijau guna memberikan pelatihan dan keterampilan kepada guru-guru di daerah yang belum terjangkau seperti di Teluk Keramat, Sambas. Kendala lain dalam peningkatan kesadaran masyarakat adalah minimnya informasi tentang isu publik. Sulitnya penjangkauan informasi yang didapatkan oleh para jurnalis karena minimnya akses ke daerah tertinggal seperti di Sambas. World Vision membentuk lokakarya guna memfasilitasi dan memberikan wawasan kepada para jurnalis tentang program pembangunan berkelanjutan (Borneo Tribune, 2013).

Pendekatan pendidikan lingkungan melalui sekolah hijau merupakan politik lingkungan (*green politic*) yang dilakukan oleh NGO seperti World Vision di Kabupaten Sambas. Politik lingkungan bukan hanya mempengaruhi masyarakat setempat untuk terlibat melestarikan lingkungan dari kerusakan hutan namun juga meningkatkan kondisi ekonomi melalui penanaman jenis vegetasi hutan yang dapat diproduksi.

Kampanye merupakan upaya yang dilakukan oleh NGO dalam membangun hubungan antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Penyuaaraan NGO digunakan untuk mendorong masyarakat agar mendukung program yang direncanakan melalui media, televisi, surat kabar dan majalah. Kegiatan penyuaaraan seperti kampanye "Dengar Anak" Tahun 2006 yang diikuti oleh Badan PBB, lembaga pemerintahan dan beberapa NGO memiliki tujuan menyadarkan masyarakat untuk mementingkan perlindungan hak anak dan juga mendorong partisipasi anak dalam proses pengambilan kebijakan (Wicaksono, W. A., 2006). Kampanye tersebut merupakan upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk meminta komitmen Indonesia dalam konvensi hak anak PBB. Pemberian pendidikan dasar secara utuh sebagai pencapaian perlindungan hak anak pada berbagai wilayah seperti di Sambas.

Kampanye yang dilakukan melalui media massa lokal memberi dampak kepada Bupati Sambas saat itu yakni Bapak Burhanuddin A Rasyid meminta pemerintah pusat memperhatikan masyarakat Sambas dalam hal kondisi pendidikan (wahyuni, 2013). Penyuaaraan tersebut juga membuat Dinas Pendidikan Sambas mendukung metode PAKEM digunakan sebagai cara membuat anak-anak kembali semangat bersekolah. World Vision memfasilitasi hubungan masyarakat dengan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Forum Pemimpin Muda (FPMN) 2010. Para anak-anak dari FPMN meminta Kementerian Pendidikan Nasional untuk meninjau kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kondisi setiap daerah (Margianto, H, 2010).

Berdasarkan forum diatas, pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk merancang kurikulum sesuai dengan kondisi daerah. World Vision dapat berkontribusi di Sambas melalui pemberian rekomendasi kurikulum ketika mengadakan seminar dengan Kemendiknas yang kemudian dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Sambas (UNFGI, 2014).

Kampanye lainnya, World Vision membangun kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan berdasarkan nilai kearifan lokal. Masyarakat Sambas yang didominasi suku Dayak sangat menghargai lingkungan alam seperti hutan. Menurut Priyadi dkk (1997: 27-30 dalam Seli, S., 2009) bahwa nilai adat masyarakat Dayak terdiri dari *Adil ka' talino*; *Bacuramin ka' saruga*; *Basengat ka' jubata*. Pengertian Adil ka' talino yakni adil terhadap sesama manusia. Bacuramin ka' saruga yaitu bercermin ke surga dengan maksud bahwa perbuatan adil dengan sesama makhluk hidup menjadi jalan ke surga. Basengat ka' Jubata berarti kehidupan yang bergantung kepada Tuhan Maha Esa. Nilai adat tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dayak untuk adil terhadap sesama dan makhluk hidup. Hutan menjadi wadah mereka untuk bertahan hidup menjalankan nilai kebiasaan tersebut seperti bertani dari hasil hutan secara bergotong-royong. Nilai kebiasaan tersebut turun-temurun dilakukan oleh anak cucu mereka. Dengan kata lain, menjaga lingkungan merupakan perbuatan adil terhadap sesama

mahluk hidup melalui semangat gotong-royong.

Proses pembelajaran melalui nilai gotong royong untuk mempertahankan kearifan lokal kepada para pendidik dan anak-anak di sekolah agar sadar menjaga kelestarian hutan. Mereka diajarkan sebagai 'Tree-Guarding Knights' untuk mengelola bersama taman jenis pohon hutan seperti mahoni dan trembesi. Pengelolaan dilakukan dengan membagi siswa dan guru pada beberapa bidang seperti mempersiapkan tanah, mengumpulkan air, dan menyiapkan bibit jenis pohon hutan (Lumbanraja, L., 2013). Hal ini menjadi pembelajaran efektif dari PAKEM untuk menyadarkan warga sekolah tidak menghilangkan kearifan lokal yakni semangat gotong royong yang dimiliki suku Dayak.

World Vision memiliki status *General Consultative* (konsultatif umum) dapat berkontribusi untuk memberikan pertimbangan kepada dewan ekonomi dan sosial PBB beserta badan bawahannya berdasarkan fungsi yang dijalankan (ECOSOC, 1996). Berdasarkan status tersebut NGO juga dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini juga diungkapkan pemerintah Indonesia bahwa kedudukan NGO sebagai status konsultatif dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Upaya advokasi World Vision dilakukan di Indonesia bersama dengan perhimpunan INGO. Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dari PBB pada tahun 1992. Indonesia tidak memberikan laporan beberapa periode dalam pelaksanaan KHA dan kemudian World Vision membuat serta menyerahkan laporan alternatif sebagai bahan pertimbangan kepada konvensi hak anak PBB. Laporan tersebut juga diambil berdasarkan kondisi masyarakat seperti di daerah Sambas sebagai wilayah yang memiliki permasalahan deforestasi. Permintaan yang diajukan adalah mendesak pemerintah agar segera menetapkan kebijakan menjamin hak pendidikan bagi setiap anak yang tinggal di Indonesia. Pemerintah meninjau kembali kurikulum di sekolah dan kebijakan lainnya terkait pendidikan untuk pemenuhan hak pendidikan

anak Indonesia menyesuaikan kondisi lingkungannya (Save the Children, 2010).

Advokasi oleh World Vision dan NGO lainnya melalui laporan alternatif dapat memberikan pertimbangan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Kemudian UNESCO menyelenggarakan *World Conference on Education for Sustainable Development* Tahun 2009 yang menghasilkan Deklarasi Bonn. Melalui Deklarasi Bonn, setiap negara salah satunya Indonesia harus mengintegrasikan konsep *Education for Sustainable Development* ke dalam sistem pendidikan, pengembangan guru dan kurikulum. Deklarasi tersebut juga menempatkan NGO untuk memiliki posisi dalam mendukung negara dalam mengimplementasikan aktivitas ESD di berbagai daerah (UNESCO, 2009).

Program pemerintah yakni Adiwiyata sebagai landasan sekolah hijau menjadi wujud operasional dari pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran sumber daya manusia dan mempertahankan fungsi lingkungan yang berkelanjutan (UNESCO, 2011 : 16-19). Berdasarkan Deklarasi Bonn, NGO dapat menjadi mitra pemerintah di Indonesia untuk mendukung implementasi sekolah hijau hingga tingkat Kabupaten berdasarkan prinsip program Adiwiyata (kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Walaupun NGO seperti World Vision tidak berpengaruh secara langsung kepada pemerintah, namun advokasi yang dilakukan memberikan posisi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Laporan alternatif tersebut sebagai penyebaran informasi untuk badan pertimbangan PBB tentang kondisi hak anak seperti di Sambas yang mengalami dampak deforestasi. Hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk sadar menjaga citra baiknya di luar maupun di dalam negara secara khusus dalam penerapan ESD.

Kampanye sebagai bagian dari advokasi, juga dilakukan untuk penyuaan kepentingan seperti pertemuan FPMN dengan Kemendiknas guna mendorong partisipasi anak dalam perencanaan pendidikan kontekstual sesuai komitmen kebijakan. Penyuaan lainnya untuk pengembangan kapasitas masyarakat sejak usia dini melalui kesadaran pelestarian hutan

berdasarkan nilai lokal melalui penanaman vegetasi hutan. Advokasi yang dilakukan World Vision merupakan proses pemberdayaan untuk membangun daya atau kemampuan potensi lokal. Bersama para tenaga pendidik Sekolah Dasar mensosialisasikan pelestarian hutan kepada anak-anak sekolah dasar guna menanamkan nilai kepedulian lingkungan. Penyuaran kepentingan masyarakat merupakan *Enabling Process* sebagai upaya pemberdayaan untuk membantu masyarakat Sambas memiliki haknya kembali sebagai bagian penyelenggaraan negara.

Education, Training and Capacity Building

Hal ini dimulai dengan meningkatkan kapasitas atau kemampuan sumber daya manusia yakni kepada para pengajar. Tahun 2010, para pengajar diperkenalkan terlebih dahulu mengenai metode PAKEM di daerah Sanggau. Kemudian pelatihan petama tahun 2011, para pengajar dilatih untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam memberikan manfaat menjaga lingkungan kepada peserta didik. Tujuannya agar mereka dapat berperan aktif dan kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran seperti penggunaan sumber daya lokal yang kemudian dibuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP sebagai fokus para pengajar (Wibowo, I., 2014).

Hingga Tahun 2013, World Vision membentuk *Training of Trainer* (ToT) sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat sekolah melalui tim sosialisasi program sekolah hijau ke wilayah lain di Sambas yang berasal dari para pengajar yang terlebih dahulu mendapatkan pelatihan sejak Tahun 2011 (Sinambela, S., 2014). Tahun 2013, World Vision mensosialisasikan pelestarian hutan melalui kegiatan penanaman bibit jenis tanaman hutan seperti mahoni, trembesi dan lainnya. NGO tersebut juga melakukan lokakarya di Bappeda Kalimantan Barat untuk memperkenalkan metode pendidikan lingkungan agar dapat menjadi contoh di sekolah-sekolah lain (volare, 2013).

Tim sosialisasi program Sekolah Hijau juga memberi dampak implementasi

kepada sekolah-sekolah di Teluk Keramat seperti peserta didik yang dapat mensosialisasikan metode pembelajaran yang didapatkan dalam memanfaatkan barang bekas atau sulit terurai. Pendidikan lingkungan telah menyadarkan dan mendorong partisipasi masyarakat sekolah untuk ikut melindungi dan melestarikan hutan di daerah Sambas (Lele, B., 2014). Upaya dalam penanaman nilai kepedulian lingkungan melalui pendidikan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, upaya kemitraan dengan pemerintah menjadi penting bagi World Vision untuk melakukan pelestarian hutan melalui sekolah hijau di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Government and NGO Partnership

Sekolah hijau merupakan program pendidikan berbasis lingkungan untuk penanaman nilai perlindungan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah memiliki komitmen setiap tahunnya terdapat satu program sekolah hijau pada setiap tingkat pendidikan sekolah di Kabupaten atau Kota. NGO dapat menjadi mitra untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mengembangkan program sekolah hijau di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten. Kemitraan yang dilakukan World Vision di Sambas melalui pengembangan program sekolah hijau ditingkat pendidikan dasar (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Berdasarkan perencanaan pemerintah terhadap pendidikan lingkungan di Indonesia, World Vision memperkenalkan konsep sekolah hijau kepada Kementerian Pendidikan Nasional sehingga dapat beroperasi dengan nota kesepakatan antara NGO tersebut dengan pemerintahan Kabupaten Sambas yang diwakili Dinas Pendidikan (Tribun Pontianak, 2012).

Salah satu hubungan pemerintah dan NGO yakni dukungan dari Bupati Sambas pada saat pertemuan regional perwakilan World Vision di Indonesia se-Kalimantan Barat. Bupati Sambas Dr. Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH memberikan apresiasi pelaksanaan program sekolah hijau di kecamatan Teluk Keramat dan Sajingan Besar (Pemkab Sambas, 2014). World Vision

juga bekerjasama dengan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas melakukan penanaman 500 batang bibit pohon hutan di beberapa sekolah yang menjadi program sekolah hijau World Vision (Lumbanraja, L., 2013).

KESIMPULAN

World Vision sebagai NGO bekerjasama dengan Indonesia untuk memberdayakan masyarakat melalui sekolah hijau. Pemberdayaan dilakukan karena kesadaran pemerintah belum dapat mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan juga masyarakat tidak memiliki daya untuk menjaga dan melestarikan hutan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. World Vision mempengaruhi masyarakat setempat untuk terlibat melestarikan lingkungan dari kerusakan hutan dan juga meningkatkan kondisi ekonomi melalui penanaman jenis vegetasi hutan yang dapat diproduksi. Pendidikan lingkungan merupakan cara penyadaran agar dapat diterapkan oleh para pengajar di Sambas sehingga berdampak bagi masyarakat untuk tetap menjaga kearifan lokal yang dimulai dari sekolah.

Upaya advokasi seperti kampanye dilakukan untuk membantu masyarakat memiliki haknya kembali atas pendidikan sesuai kondisi lingkungan di Sambas dan bahan pertimbangan pemerintah menindaklanjuti ESD. Pemerintah juga menjadikan NGO seperti World Vision sebagai mitra pemerintah mengembangkan pendidikan lingkungan hingga tingkat Kabupaten.

Pelatihan yang diberikan NGO seperti World Vision membantu kekuatan masyarakat untuk menggunakan potensi lokal melalui sekolah hijau. Kemitraan perwakilan World Vision dengan pemerintah tingkat daerah melalui kesepakatan dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Sambas, membuat pendidikan lingkungan dan disesuaikan dengan adanya lokakarya guna berbagi informasi pendidikan di Sambas.

Pelaksanaan sekolah hijau di Kabupaten Sambas masih memiliki kelemahan karena penjangkauannya belum menyeluruh. Kelemahan lainnya adalah

usaha pelestarian tersebut tidak dapat mengurangi deforestasi yang terjadi di Sambas hingga tahun 2014. Namun pelaksanaannya dikatakan berhasil karena upaya penyadaran pendidikan lingkungan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Sambas. Masyarakat dapat berpartisipasi menerapkannya hingga beberapa sekolah lainnya melalui pembentukan tim sosialisasi program sekolah hijau.

DAFTAR PUSTAKA:

- Food and Agriculture Organization. (2015). *Forest Resources Assessment 2015*. Diakses pada 05 Oktober, 2015, dari <http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf>
- Haynes, J., Betsill, M. M., Hochstetler, K., Stevis, D., Carver, T., Martin, J., et al (Eds.). (2006). *Palgarve Advances in International Environmental Politics*. New York: Palgrave Macmillan
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Huruswati, I. (2012). *Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Desa Perbatasan Kalimantan Barat*. Jakarta: P3KS Press
- Ife, J. W. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Refika Adirama
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2012). *Pedoman Pengembangan Garis Besar Isi Materi (GBIM) Pendidikan Lingkungan Hidup*. Diakses pada Mei 2016 pada <http://lh.surabaya.go.id/userfiles/pemulihan/GBIM.pdf>
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2012). *Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Indonesia*. Diakses pada Oktober

- 2015 pada http://www.menlh.go.id/DATA/FINAL_ISI_25_Januari_2012.pdf
- RPJMD Sambas. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas (2012-2016)*. Diakses pada agustus 2015 dari <http://sambas.go.id/rencana-pembangunan-daerah/tahun-anggaran-2014/3134-rpjmd-kab-sambas-2012-2016>
- Salim, E. (2005). *Environment Education and Ngos in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Save The Children (2010). *Review Report The Implementation of Convention on The Rights of The Child In Indonesia 1997-2009*. Diakses 17 Maret, 2016 dari http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IDN/INT_CRC_ICO_IDN_15725_E.pdf
- Strategi dan rencana aksi provinsi: REDD + Kalbar (n.d.). Diakses pada 08 September, 2015, dari http://www.gcftaskforce.org/documents/SRAP_west_kalimantan_2014_ID.pdf
- Sumodiningrat, G. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Sutomo. (1998). *Menempatkan Masyarakat Pada Posisi Sentral Dalam Proses Pembangunan*. Diakses pada Juli 2016 dari Sulistiyani, A. M. 2007. *Konseptual Model Pemberdayaan LSM Sebagai Fasilitator Pembangunan*
- Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas. (2005). *Introduction to International Relations Perspectives & Themes, 2nd edition*: 382. Diakses pada Oktober 2015 dari Ikbar, Y. (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Badung: PT Refika Adirama
- Ulleberg, I. (2009). *The Role and Impact of NGOs in Capacity Development from Replacing The State to Reinvigorating Education*. France: UNESCO
- UNESCAP. (2000). *United Nation Economic and Social Commission for Asia and The Pasific: Introduction Role of NGOs and Major Group*. New York: Author. Chapter 14-15
- UNESCO. (2009). *Bonn Declaration*. Diakses pada April 2016 dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188799e.pdf>
- UNESCO. (2011). *Education for Sustainable Development Country Guidelines For Changing The Climate of Teacher education to Address Sustainability*. Diakses pada April 2016 dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002152/215280E.pdf>
- Willetts, P. (2011). *Non-Governmental Organizations in World Politics: The Construction of Global Governance*. New York: Routledge
- Sumber Jurnal dan Penelitian:**
- Tuijl, P. V., dkk. 2005. *NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing Country*
- Tulung, Freddy. (2002). *Membangun NGO yang Kuat, Demokratis dan Transparan: Perspektif Pemerintah*. Diakses dari Tuijl, P. V., dkk. 2005. *NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing Country*. Diakses pada Juni 2016 dari http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/Peter_NGO%20accountability%20in%20Indonesia%20July%2005%20version.pdf
- Seli, S (2009). *Pandangan dan Sikap Hidup Suku Dayak Bakati Yang Tercermin Dalam Cerita Rakyat Dayak Bakati*.

- Diakses pada 18 Mei 2016 dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=112275&val=2338>
- Sulistiyani, A. M. (2007). *Konseptual Model Pemberdayaan LSM Sebagai Fasilitator Pembangunan*. Diakses pada Juli 2016 dari www.journal.ugm.ac.id/jkap/article/download/8564/6595
- Sumber Internet:**
- Borneo Tribune. (2013). *Jadikan Kalbar Provinsi Layak Anak*. Diakses pada 28 April 2016 dari <https://issuu.com/habete/docs/30jan20133/1>
- Canadian Coalition on Climate Change Development. (2013). *Vulnerability and Capacity Assessment in West Kalimantan, Indonesia*. Diakses pada Maret, 2016 dari <http://c4d.ca/wp-content/uploads/2013/03/2010-Case-Study-World-Vision-Indonesia1.pdf>
- ECOSOC. (1996). *Resolution 1996/31: Consultative Relationship Between The United Nations and Non-Government Organizations*. Diakses pada April 2016 dari <http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm>
- Lele, B. (2014). *Konsep Sekolah Hijau Gerakan Hati Masyarakat di Perbatasan*. Diakses pada April, 2016 dari <http://www.batasnegeri.com/konsep-sekolah-hijau-gerakan-hati-masyarakat-di-perbatasan/>
- Listiya, T. (2015). *Forest Watch Indonesia: Laju Deforestasi Indonesia Capai 1,1 Juta Ha per Tahun*. Diakses pada Juli 2016 dari <http://m.beritasatu.com/kesra/240877-forest-watch-indonesia-laju-deforestasi-indonesia-capai-11-juta-ha-per-tahun.html>
- Lumbanraja, L. (2013). *Mencintai Lingkungan Sejak Dini*. Diakses pada 28 April 2016 dari http://www.wvindonesia.org/?mod=205&id=3372&WVI_ID=kbgeobekft
- Margianto, H. (2010). *Kurikulum Daerah Tidak Kontekstual*. Diakses pada April 2016 dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/08/16084046/Kurikulum.Daerah.Tidak.Kontekstual>
- Pemkab Sambas. (2014). *Bupati Buka Pertemuan Regional WVI Se-KALBAR*. Diakses pada Maret 2016 dari <http://sambas.go.id/informasi-daerah/102-pemerintah-daerah/3166-bupati-buka-pertemuan-regional-wvi-se-kalbar.html>
- Sinambela, S. (2014). *Green School Starts To Spread Its Wings*. Diakses pada Maret 2016 dari http://www.wvindonesia.org/?mod=205&id=3485&WVI_ID=592e345e98d259da9a919a2fd5dba954
- Tribun Pontianak. (2012). *WVI-Disdikk Teken MOU Sekolah Hijau*. Diakses pada Maret 2016 dari <http://pontianak.tribunnews.com/2012/02/16/wvi-disdik-teken-mou-sekolah-hijau>
- UNESCO. (2011). *Education for Sustainable Development Country Guidelines For Changing The Climate of Teacher education to Address Sustainability*. Diakses pada April 2016 dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002152/215280E.pdf>
- UNFGI. (2014). *Sekolah Hijau WVI Bawa Sambas Raih MGDs Awards 2013*. Diakses pada April, 2016 dari <http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/en/unfghi/innovation-news/441-sekolah-hijau-wvi-bawa-sambas-raih-mgds-awards-2013>
- Volare, W. (2013). *Meningkatkan Pendidikan Dengan Konsep Kontekstual Hijau*. Diakses pada April, 2016 dari <http://www.volarefm.com/meningkatkan-pendidikan-dengan-konsep-kontekstual-hijau/>

- Wahyuni, A (2013). *Wajah Pendidikan Anak Pedalaman*. Diakses pada Maret 19, 2016 dari https://www.facebook.com/permalink.php?id=166522833508692&story_fbid=166637676830541
- Wibowo, I. (2014). *Program Sekolah Hijau Siswa SD Perbatasan Sambas*. Diakses pada Maret 2016 dari <http://www.antarakalbar.com/berita/326113/program-sekolah-hijau-siswa-sd-perbatasan-sambas>
- Wicaksono, W. A.,. (2006). *Membangun Indonesia Ramah Anak Lewat Program Dengar Anak*. Diakses pada April, 2016 dari <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&jd=Membangun+Indonesia+Ramah+Anak+Lewat+Program+%93Dengar+Anak!%94&dn=20061124093923>
- WVI. (2010). *Laporan Semester II 2010*. Diakses pada April, 2016 dari <http://www.wvindonesia.org/images/article/2244/LaporanSemester2.pdf>
- World Vision International. (2011). *Accountability Report*. Diakses pada Februari, 2016 dari http://www.ingoaccountabilitycharter.org/wpcms/wp-content/uploads/World-Vision-International-2010-GI-Report_formatted.pdf